

SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2025

001/PM.00.01/K.NT-17/07/2025

TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

- ABSTRAK : - Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengawasi jalannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dan untuk untuk menciptakan alur pelaporan yang sistematis, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil pengawasan kepada pimpinan secara berjenjang. Selain itu, tim ini bertujuan memastikan tersedianya dukungan teknis dan administrasi yang memadai bagi seluruh aktivitas pengawasan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- : - Dasar hukum pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga ini adalah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023.
 - Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
- Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dirancang sebagai struktur kerja terpadu untuk memastikan keakuratan data pemilih secara terus-menerus dan kerja kolaboratif yang menggabungkan fungsi kebijakan, pengawasan teknis, dan dukungan administratif untuk menjaga kualitas data pemilih di Kabupaten Sumba Barat Daya tetap valid dan akuntabel
- Kelompok Kerja ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan dikemudian hari
- Catatan : POKJA ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juli 2025